



LKJ 2015

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

**DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARMASIN**

DAFTAR ISI :

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Kata Pengantar.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Data Umum Organisasi	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi	4
1.4 Landasan Hukum.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KUNERJA	11
2.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	11
2.1.1 Visi dan Misi	11
2.2 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.....	12
2.3 Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.1.1 Angka Melek Huruf.....	25
3.1.2 Persentasi Kelulusan UAN	28
3.1.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah	30
3.1.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	32
3.1.5 Angka Partisipasi Murni (APM).....	37
3.1.6 Angka Partisipasi Kasar (APK)	41
3.1.7 Jumlah Guru Berkualifikasi	44
3.1.8 Rasio Guru Asesor	45
3.1.9 Persentasi Rata-rata SPM	46
3.1.10 Persentasi Sekolah sesuai BNSP	47
3.2 Realisasi Anggaran	48
BAB III PENUTUP.....	56

DAFTAR TABEL :

	Halaman
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja (PK)	14
Tabel 2.3 Program dan Pagu Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	21
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 3.2 Persentasi Capaian Kinerja Sasaran	24
Tabel 3.3 Persentasi Capaian Kinerja Indikator 1.1 Sasaran 1	25
Tabel 3.4 Persentasi Capaian Kinerja Indikator 1.2 Sasaran 1	28
Tabel 3.5 Persentasi Capaian Kinerja Indikator 2.1 Sasaran 2	30
Tabel 3.6 Persentasi Capaian Kinerja Indikator 2.2 Sasaran 2	32
Tabel 3.7 Persentasi Capaian Kinerja Indikator 2.3 Sasaran 2	37
Tabel 3.8 Persentasi Capaian Kinerja Indikator 2.4 Sasaran 2	41
Tabel 3.9 Persentasi Capaian Kinerja Indikator 3.1 Sasaran 3	45
Tabel 3.10 Persentasi Capaian Kinerja Indikator 3.2 Sasaran 3	46
Tabel 3.11 Persentasi Capaian Kinerja Indikator 4.1 Sasaran 4	47
Tabel 3.12 Persentasi Capaian Kinerja Indikator 4.2 Sasaran 4	47
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran	48
Tabel 3.14 Realisasi Persentasi Capaian Anggaran	56
Tabel 4.1 Program dan Anggaran	58

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan good governance, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam upaya mewujudkan good governance.

Banjarmasin, 31 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin



Dis. H. Murlan, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19631106 198903 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Data Umum Organisasi

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang profesional serta memahami tugas dan Fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan,

Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan yang dipercayakan kepada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tema Strategis pada periode 2011 – 2015 ditekankan pada pembangunan penguatan pelayanan. Setelah rasio kebutuhan dan sediaan sarana dan prasarana pendidikan nasional menjadi optimal, fokus selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan agar relevan dan berdaya saing. Sasaran dan program-program kerja yang terkait harus mampu menjawab tuntutan mutu dari kapasitas pendidikan yang semakin besar serta otonomi daerah yang semakin dewasa.

Maksud dan Tujuan penyusunan LAKIP Pendidikan Kota Banjarmasin adalah :

1. Memberikan gambaran program kerja dan rencana kinerja yang akan dicapai, hambatan dan standar pelayanan.
2. Memenuhi asas *pelayanan prima* kepada masyarakat dalam penanganan bidang pendidikan.
3. Sebagai standar Kinerja Instansi Pemerintah yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pendidikan yang meliputi Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengelolaan Layanan dan Pembinaan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan termasuk Pendidikan Luar Sekolah, Peningkatan Mutu Pendidikan serta pengendaliannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan dalam rangka perencanaan, pengelolaan layanan, dan pengembangan bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
2. Melakukan layanan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Tingkat Dasar, dan Pendidikan Menengah.
3. Penyelenggaraan, pembinaan dan petunjuk teknis pemeliharaan, pengembangan, perawatan, pengadaan, pendistribusian sarana pendidikan.
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar kesiswaan dan perpustakaan, pendidikan luar sekolah serta pemberdayaan peran serta masyarakat.
5. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan pendidikan menengah program dan kurikulum, kesiswaan dan perpustakaan, pembinaan pendidikan luar sekolah serta pemberdayaan peran serta masyarakat.
6. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan terhadap tenaga edukatif pada tingkat dasar dan menengah.
7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan terhadap kebudayaan, kesejahteraan dan keolahragaan kesiswaan.
8. Penyelenggaraan dan pengendalian serta pemberian perizinan di bidang pendidikan.
9. Pengaturan dan Pengawasan Penerimaan Siswa Baru (PSB), Keuangan Sekolah.
10. Ketatalaksanaan Sarana dan Prasarana Sekolah, Tenaga Teknis, Ijazah dan Perpustakaan Sekolah;
11. Melaksanakan koordinasi Pembangunan Pendidikan Lintas SKPD, Lembaga-lembaga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka peningkatan layanan pendidikan bermutu.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Ruang lingkup penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin meliputi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan dengan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kota Banjarmasin. Pembinaan dan pelayanan pendidikan itu baik yang berbasis sekolah maupun yang berbasis masyarakat. Perencanaan Pembangunan Pendidikan ini menyajikan keadaan umum nonpendidikan dan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keadaan umum nonpendidikan yang disajikan meliputi informasi tentang administrasi pemerintah daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta transportasi dan komunikasi. Informasi itu sangat diperlukan dan mempunyai saling keterkaitan yang mendukung perkembangan pendidikan di daerah. Keadaan umum pendidikan mencerminkan variabel-variabel pendidikan menurut jenjang serta kemajuan yang dicapai melalui indikator-indikator pendidikan di setiap jenjang pendidikan.



Sesuai dengan bahan yang tersedia disajikan kinerja yang mencerminkan kaitan antara indikator-indikator internal dan eksternal dengan permasalahannya sehingga diharapkan dapat memberikan informasi untuk keperluan perencanaan. Data yang

tersedia disajikan dalam bentuk tabel dan memuat data dasar, (baik yang bersumber dari pemda, BPS, Dinas Pendidikan maupun dari instansi lain) mengenai pendidikan dan data olahan yang menghasilkan indikator seperti angka, rasio, dan perbandingan pendidikan menurut jenis dan jenjang pendidikan.

Dalam Perencanaan pembangunan bidang pendidikan seperti perencanaan di tingkat kota Banjarmasin diperlukan data dan informasi yang lengkap tidak hanya menyangkut data di lingkungan Dinas Pendidikan melainkan juga di luar Dinas Pendidikan. Pada kenyataannya, untuk mendapatkan data dan informasi, khususnya di luar Dinas Pendidikan sangat sulit. Hal itu disebabkan karena semua instansi memiliki data masing-masing dan belum ada instansi yang melakukan integrasi terhadap data setiap instansi. Agar diperoleh data yang terintegrasi, lengkap, dan mutakhir mengenai keadaan pendidikan maka perlu di kaitkan dengan data dan informasi di luar Dinas Pendidikan seperti administrasi pemerintah daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama serta transportasi dan komunikasi. Selain itu, untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan tidak hanya dapat dilakukan melalui faktor internal pendidikan melainkan juga harus dilihat faktor eksternal lainnya atau di luar pendidikan.

Untuk mengatasi masalah di atas yang cukup komprehensif di kota Banjarmasin dapat dipandang sebagai bahan masukan yang cukup handal untuk penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan yang realistis. Oleh karena itu, dengan menggunakan proses Perencanaan Pembangunan yang Komprehensif dapat diketahui dan diperhitungkan berbagai faktor yang ada dalam suatu wilayah, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah dan khususnya perkembangan pendidikan.

Berdasarkan data dan informasi yang komprehensif yang termuat di dalam proses perencanaan Pembangunan pendidikan dasar dan

menengah dapat dilakukan analisis secara deskriptif untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah. Kemudian dengan menggunakan kinerja yang ada diharapkan dapat dilakukan identifikasi masalah terhadap pemerataan, mutu dan relevansi, serta Akuntabilitas dan Citra Publik. Berdasarkan masalah yang ada, maka dilakukan analisis untuk perencanaan dengan pendekatan berdasarkan data dan informasi yang ada.

Tujuan umum disusunnya Perencanaan Pembangunan Pendidikan adalah menghasilkan data dan informasi yang terintegrasi antara data pendidikan dengan data non-pendidikan yang dapat digunakan untuk semua pihak yang berkepentingan. Dimana tujuan khususnya adalah untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah di suatu daerah, masalah yang dihadapi sebagai bahan perencanaan yang menyangkut pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan manajemen pendidikan. Setelah diketahui masalah tersebut, diharapkan dapat disusun cara mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, kinerja pendidikan yang telah dikaitkan dengan faktor eksternal tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan seperti penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan, penyusunan kebijakan operasional pendidikan, dan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya informasi pendidikan di kota Banjarmasin.

Untuk Menjalankan seluruh program dan kegiatan bidang pendidikan maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2008 bahwa susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubag Keuangan
 - Kasubag Program
3. Bidang PAUD dan PNFI, membawahi :

- Seksi PAUD
 - Seksi Dikmas, Kursus dan Kelembagaan
 - Seksi Ketenagaan
4. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi
 - Seksi Kurikulum dan Kelembagaan
 - Seksi Sarana Prasarana dan perpustakaan
 - Seksi Kesiswaan dan Prestasi
 5. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi
 - Seksi Kurikulum dan Kelembagaan
 - Seksi Sarana Prasarana dan perpustakaan
 - Seksi Kesiswaan dan Prestasi
 6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Seksi Pengembangan Profesi
 - Seksi Pembinaan TK dan SD
 - Seksi Pembinaan SMP, SMA dan SMK
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 8. Jabatan Fungsional

1.4 Landasan Hukum

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2015 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 ttentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banjarmasin Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarmasin Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

14. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 561 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin No 403 Tahun 2013 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Banjarmasin Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja(LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2015 adalah:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran Strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini menginformasikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Dalam rangka menunjang akuntabilitas Pemerintah Kota Banjarmasin, sebelum menetapkan Visi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terlebih dahulu dikembangkan Visi Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN YANG MANDIRI, HARMONIS, RELIGIUS, BERIMAN DAN BERTAQWA TAHUN 2015"**

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin selaku penanggung jawab sistem pendidikan di Kota Banjarmasin memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Tahun 2011-2015 yang mengacu pada Misi ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015, yaitu terpenuhinya pelayanan pendidikan yang berkualitas. Misi tersebut selanjutnya disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada.

2.1.1 VISI dan MISI

A. VISI

Visi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sesuai dengan RENSTRA adalah **" Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan untuk Membentuk Insan Cerdas Komprehensif**

B. MISI

Misi yang dikembangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan kaitan Misi Kemendiknas adalah " 5 K "

- Misi ke 1 Meningkatkan **Ketersediaan** Layanan Pendidikan

- Misi ke 2 Meningkatkan **Keterjangkauan** Layanan Pendidikan
- Misi ke 3 Meningkatkan **Kualitas/Mutu** dan Relevansi Layanan Pendidikan
- Misi ke 4 Meningkatkan **Kesetaraan** dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
- Misi ke 5 Meningkatkan **Kepastian/Keterjaminan** Memperoleh Layanan Pendidikan

2.2 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banjarmasin telah direvisi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 561 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 403 Tahun 2014 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Banjarmasin dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2015 :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Banjarmasin	Angka Melek Huruf	99.14%
		Persentasi Kelulusan	
		- SD/MI	100%
		- SMP/MTs	99.14%
		- SMA/SMK/MA	99.92%
		Persentasi Pencapaian Akreditasi Sekolah	60%
2	Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan di Kota Banjarmasin	Angka Partisipasi sekolah	
		- SD/MI	100.01%
		- SMP/MTs	99.87%
		- SMA/SMK/MA	22.60%
		Angka Parttisipasi Murni	
		- SD/MI	88.42%
		- SMP/MTs	77.62%
		- SMA/SMK/MA	34.45%
		Angka Partisipasi Kasar	
		- SD/MI	104.86%
		- SMP/MTs	112.90%
		- SMA/SMK/MA	51.90%
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	10.58 tahun
3	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Meningkatnya jumlah Guru Berkualifikasi S1 / D4 untuk semua	PNS = 780
		Jenjang Pendidikan	N.PNS = 320
		Meningkatnya Rasio Guru Asesor untuk semua jenjang Pendidikan	30.60%
4	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Meningkatnya Pesentasi jumlah Sekolah yang telah melaksanakan SPM	60%
		pada jenjang Pendidikan Dasar	

	Meningkatnya Persentasi jumlah Sekolah yang telah Melaksanakan Pelayanan Sesuai BNSP	95%
--	--------------------------------------------------------------------------------------	-----

2.3 Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Dengan mengacu pada rencana strategis periode 2011-2015 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan sumber daya anggaran yang ada, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2015. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2015:

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja (PK)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA	SAT	TARGET
1	2	N o	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Banjarmasin	1	Angka Melek Huruf	% 99.14
		2	Persentasi Kelulusan	
			- SD/MI	% 100
			- SMP/MTs	% 99.14
			- SMA/SMK/MA	% 99.92
		3	Persentasi Pencapaian Akreditasi Sekolah	% 60.00
2	Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan di Kota Banjarmasin	4	Angka Partisipasi sekolah	
			- SD/MI	% 100.01
			- SMP/MTs	% 99.87
			- SMA/SMK/MA	% 22.60
		5	Angka Partisipasi Murni	
			- SD/MI	% 88.42
			- SMP/MTs	% 77.62

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR KINERJA		SAT	TARGET
1	2	N o	3	4	
			- SMA/SMK/MA	%	34.45
		6	Angka Partisipasi Kasar		
			- SD/MI	%	104.86
			- SMP/MTs	%	112.90
			- SMA/SMK/MA	%	51.90
		7	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Th	10.58
3	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	8	Meningkatnya jumlah Guru Berkualifikasi S1 / D4 untuk semua	PNS	780
			Jenjang Pendidikan	NPN S	320
		9	Meningkatnya Rasio Guru Assesor untuk semua jenjang Pendidikan	%	30.60
4	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	10	Meningkatnya Pesentasi jumlah Sekolah yang telah melaksanakan SPM	%	60.00
			pada jenjang Pendidikan Dasar		
		11	Meningkatnya Persentasi jumlah Sekolah yang telah Melaksanakan	%	95.00
			Pelayanan Sesuai BNSP		

Untuk mewujudkan agenda kerja pemerintah daerah, maka perlu dituangkan dalam suatu wadah yang lebih mempertegas agenda tersebut yakni dalam bentuk program dan kegiatan. Program Pemerintah Kota Banjarmasin pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi serta penjabaran dari tugas pokok dan fungsi seluruh satuan kerja dalam menyukkseskan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Adapun program kegiatan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2015 ditinjau berdasarkan bidang pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

Urusan Wajib Bidang Pendidikan

1.1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan : Meningkatkan peran Aparatur Pendidik agar dapat mencapai pelayanan pendidikan yang lebih baik.

Sasaran : Tercapainya pelayanan pendidikan dengan adanya aparatur pendidik yang handal dan terampil

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
2. Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Inventaris Barang dan Aset Daerah

1.2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan : Meningkatkan aspek penatausahaan sarana di bidang aparatur

Sasaran : Tercapainya peningkatan mutu dan kualitas tentang peran serta Aparatur pendidik.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan : Memperluas akses Sumber Daya Aparatur agar optimal dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan disiplin

Sasaran : Agar peran aparatur lebih meningkat dan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

1.4. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Tujuan : Memperluas akses pendidikan bagi anak usia pra sekolah (3-6 tahun) yang belum terlayani melalui jalur pendidikan PAUD dan TK

Sasaran : Terbukanya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan usia pra sekolah

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

1.5. Program : Wajib belajar pendidikan Dasar sembilan tahun

Tujuan : Memperluas akses pendidikan bagi anak usia sekolah (7-15 tahun) untuk landasan WAJAR 9 tahun (Wajib Belajar 9 tahun)

Sasaran : Terbukanya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan usia sekolah (7-15 tahun) bagi seluruh lapisan masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pembangunan Gedung Sekolah
2. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
3. Pengadaan Mebeluer Sekolah
4. Pengadaan dan Distribusi Buku Kurikulum 2013
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
6. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK)
9. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
10. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

11. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
12. Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
13. Penyelenggaraan Ujian Nasional untuk Pendidikan Dasar
14. Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar
15. Pembangunan Pagar Sekolah
16. Penyelenggaraan Kinerja Kepala Sekolah
17. Pengadaan Lomba - lomba
18. Kegiatan Operasional Sekolah SD/SDLb/MI dan SMP/SMPLb/MTs Negeri dan Swasta (BOS APBD II)
19. Penyediaan Dana BSM untuk Jenjang SD dan SMP
20. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

1.6. Program : Pendidikan Menengah

Tujuan : Memperluas akses pendidikan sekolah menengah sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal

Sasaran: Terbukanya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan menengah sesuai dengan tuntutan pasar kerja

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pembangunan Gedung Sekolah (DED USB SMK)
2. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
4. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK)
5. Penambahan RKB Sekolah
6. Pengadaan dan Distribusi Buku Kurikulum 2013
7. Pengadaan Mebeluer Sekolah
8. Penyelenggaraan Paket C Setara SMU
9. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah / Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah / Madrasah (Upa) Kota Banjarmasin

10. Peningkatan Pembinaan Kreativitas dan Perpustakaan Kesiswaan
11. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMP)
12. Penyelenggaraan Ujian Nasional untuk Pendidikan Menengah
13. Pembinaan Kelompok kerja MGMP SMP, SMA dan SMK
14. Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Kepala SMA dan SMK
15. Pengembangan Kelas Keahlian Olah Raga (KKO)

1.7. Program : Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tujuan : Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam menghadapi persaingan global

Sasaran : Terlaksananya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
2. Pengembangan Mutu & Kualitas Program DIKLAT Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
4. Pengembangan Sistem Perencanaan & Pengendalian Program Profesi Pendidik & Tenaga Kependidikan
5. Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi

1.8. Program : Manajemen pelayanan pendidikan

Tujuan : Mewujudkan pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan yang prima dengan tersedianya data yang akurat dan akuntabel

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan manajemen pelayanan pendidikan yang prima, akurat dan akuntabel

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
2. Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan
3. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
4. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
5. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan

1.9. Program : Pendidikan Non Formal

Tujuan : Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk usia 15-44 tahun melalui keterampilan dan kecakapan hidup yang relevan

Sasaran : Mengoptimalkan fasilitas pendidikan non formal sebagai bagian dari harmonisasi pendidikan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup
2. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal
3. Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal
4. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
5. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
6. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam mewujudkan apa yang menjadi Misi seperti tercantum pada RPJMD Kota Banjarmasin yaitu “terpenuhinya pelayanan pendidikan yang berkualitas” mendapat pagu anggaran sebesar Rp 66,037,153,050,- dengan 9

Program Kegiatan adapun rinciannya bisa dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Program dan Pagu Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

NO	PROGRAM	NILAI DPA Rp
1	2	3
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,217,073,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,774,489,000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5,413,850
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3,100,000,000
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	45,204,265,000
6	Program Pendidikan Menengah	6,029,721,200
7	Program Pendidikan Non Formal	828,900,000
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	3,671,816,000
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,205,475,000
Jumlah		66,037,153,050

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama

adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2011-2015 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2015, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, Menggunakan pijakan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 sebagai

berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan sebagai penanggungjawab dari sasaran yaitu “Terpenuhinya Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas dengan memenuhi misi ke-3 dari RPJMD yaitu “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesional dalam Rangka Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat”. Untuk mencapai semua sasaran kinerja tersebut Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menetapkan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian keberhasilan IKU disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Persentase Capaian Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
1.1	Angka melek huruf	99.14	%	99.21	%	100.07
1.2	Persentasi Kelulusan UAN					
	- SD	100	%	100	%	100
	- SMP/MTs	99.14	%	100	%	100.87
	- SMA/SMK	99.92	%	99.2	%	99.28
1.3	Sekolah terakreditasi A	60	%	65	%	108.33
2.1	Angka rata – rata lama sekolah	10.58	Thn	9.97	Thn	99.28
2.2	Angka partisipasi sekolah					

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
	- SD	100.01	%	115.71	%	115.70
	- SMP/MTs	99.87	%	116.28	%	116.43
	- SMA/SMK	51.9	%	95.72	%	184.43
2.3	Angka partisipasi murni					
	- SD	88.42	%	114.85	%	129.89
	- SMP/MTs	77.62	%	98.75	%	127.22
	- SMA/SMK	34.45	%	82.09	%	238.29
2.4	Angka partisipasi Kasar					
	- SD	104.86	%	126.25	%	120.40
	- SMP/MTs	112.9	%	105.51	%	93.45
	- SMA/SMK	51.9	%	91.22	%	175.76
3.1	Jumlah Guru berkualifikasi S1/D4					
	- PNS	830	Org	2,995	Org	360.84
	- Non PNS	390	Org	761	Org	195.13
3.2	Rasio Guru Asesor	30.6	%	18.76	%	61.31
4.1	Persentasi Rata-Rata SPM	50	%	68	%	136.00
4.2	Persentasi Sekolah sesuai BNSP	95	%	98	%	103.16
Rata-rata capaian						138.74

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah 138,74 persen, maka berdasarkan kategorisasi pencapaian kinerja dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut “Sangat Berhasil”. Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

1. Angka melek huruf

Tabel 3.3
Persentase Capaian Kinerja Indikator 1.1 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
Angka melek huruf	99,14	%	99.97*	%	100,07

* Angka Prakiraan sumber BPS

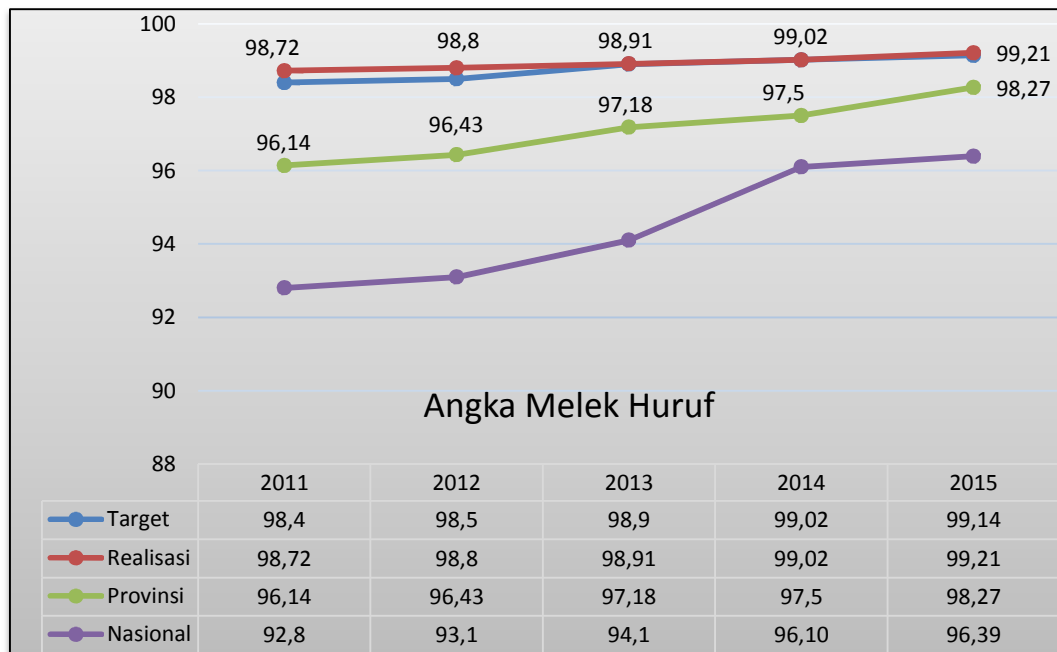
Angka Melek Huruf (AMH) adalah Proporsi penduduk 15 tahun ke atas terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau

tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut diatas adalah :

- a. Meningkatkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan melalui Paket A, Paket B, Paket C dan Keaksaraan Fungsional pada masyarakat.
- b. Membuka pelatihan keahlian untuk masyarakat di sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 24 PKBM yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin.



Data Capaian Kinerja Indikator 31 Sasaran 11 selama 5 tahun terakhir bisa dilihat dari grafik berikut :



Jika dilihat dari capaian kinerja indikator Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin selama 5 tahun terakhir terjadi peningkatan setiap tahunnya secara konstan, dari tahun 2011 Kota Banjarmasin realisasi sebesar

98,72 sudah melebihi Realisasi Provinsi Kalimantan Selatan yang Cuma sebesar 96,14 dan juga target nasional sebesar 92,14. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan cukup efektif untuk meningkatkan Angka Melek Huruf yang ada di Kota Banjarmasin.

Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 96,39 persen pada tahun 2015 dan realisasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sebesar 89.27 persen maka Kota Banjarmasin sudah melampaui target yang ada yaitu sebesar 99,21 persen atau lebih tinggi sebesar 0,94 persen.



2. Persentasi Kelulusan UAN

Tabel 3.4
Persentase Capaian Kinerja Indikator 1.2 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
Peresentasi Kelulusan UAN					
- SD	100	%	100	%	100
- SMP/MTs	99,92	%	100	%	100.87
- SMA/SMK	99, 92	%	99.20	%	99,28
Rata-rata capaian					99,78

Pada tahun 2015 Kelulusan masih belum bisa 100 persen untuk Kota Banjarmasin tingkat kelulusan rata-rata sudah 99.78 persen, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2014 maka sudah terjadi kenaikan sebesar 0,41 persen. Hal ini disebabkan pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK tingkat kelulusannya masih belum 100 persen. Diharapkan pada tahun berikutnya tingkat kelulusan di Kota Banjarmasin sudah mencapai 100 persen untuk semua jenjang pendidikan, dimana Dinas Pendidikan sebagai penanggungjawab urusan pendidikan bisa meningkatkan kualitas pendidikan baik itu dalam prestasi akademik maupun prestasi diluar akademik.

No.	Satuan Pendidikan	Peserta Ujian		Peserta Lulus	
1.	- SD/MI	11.496	Siswa	11.496	Siswa
2.	- SMP/MTs	10.684	Siswa	10.684	Siswa
3.	- SMA/SMK/MA	8.904	Siswa	8.833	Siswa

g

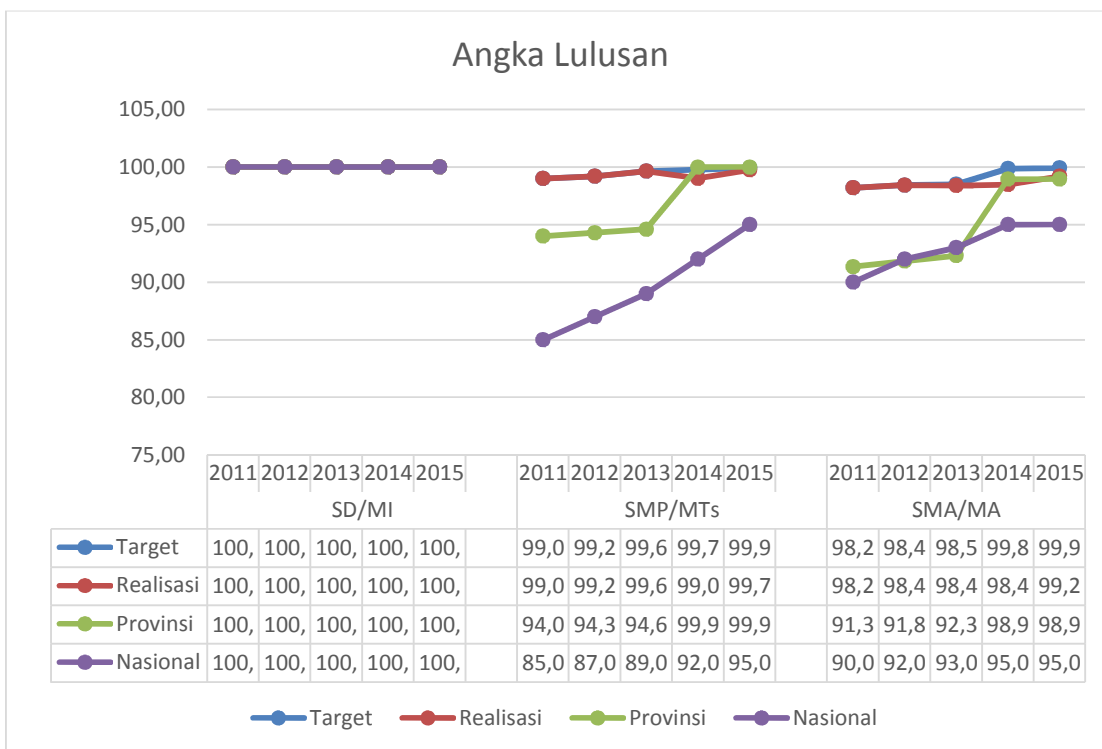
ka Pendidikan yang ditamatkan Dinas Pendidikan secara umum telah sesuai dengan target nasional dimana kelulusan untuk tingkat SD, SMP dan SMA telah tercapai dan Dinas Pendidikan telah berhasil meningkatkan kualitas belajar siswa untuk setiap jenjang pendidikan. Peningkatan kualitas tersebut erat kaitannya



dengan segala persiapan sebelum pelaksanaan ujian akhir dengan mengadakan Try Out secara berkala, peningkatan mutu sekolah dan semakin banyaknya siswa yang mau datang ke

perpustakaan Sekolah dengan semakin lengkapnya penyediaan buku referensi pembelajaran.

Data Capaian Kinerja Indikator 1.2 Sasaran 1 selama 5 tahun terakhir bisa dilihat dari grafik berikut :



Angka kelulusan pada tingkat SD/MI sudah mencapai target baik itu realisasi provinsi maupun nasional dimana dari tahun 2011 sampai tahun 2015 sudah terealisasi 100 persen, sedangkan untuk tingkat SMP/MI dari tahun 2011 sampai tahun 2013 angka kelulusan kota Banjarmasin sudah melebihi realisasi provinsi dan nasional, akan tetapi pada tahun 2015 Angka Lulusan Kota Banjarmasin realisasinya lebih rendah jika dibandingkan dengan

realisasi provinsi sebesar 0,2 persen tetapi lebih besar dari target nasional sebesar 4,7 persen. Untuk tingkat kelulusan SMA/MA dari tahun 2011 sampai tahun 2013 Kota Banjarmasin sudah melampaui



provinsi dan nasional, bahkan pada akhir periode RPJMD tahun 2015 angka kelulusan Kota Banjarmasin sudah melebihi realisasi provinsi sebesar 0,3 persen dan 4,2 persen diatas target nasional. Hal ini merupakan bukti kerja keras insan pendidikan di Kota Banjarmasin yang berhasil meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan secara merata.

3. Angka rata – rata lama sekolah

Tabel 3.5
Persentase Capaian Kinerja Indikator 2.1 Sasaran 2

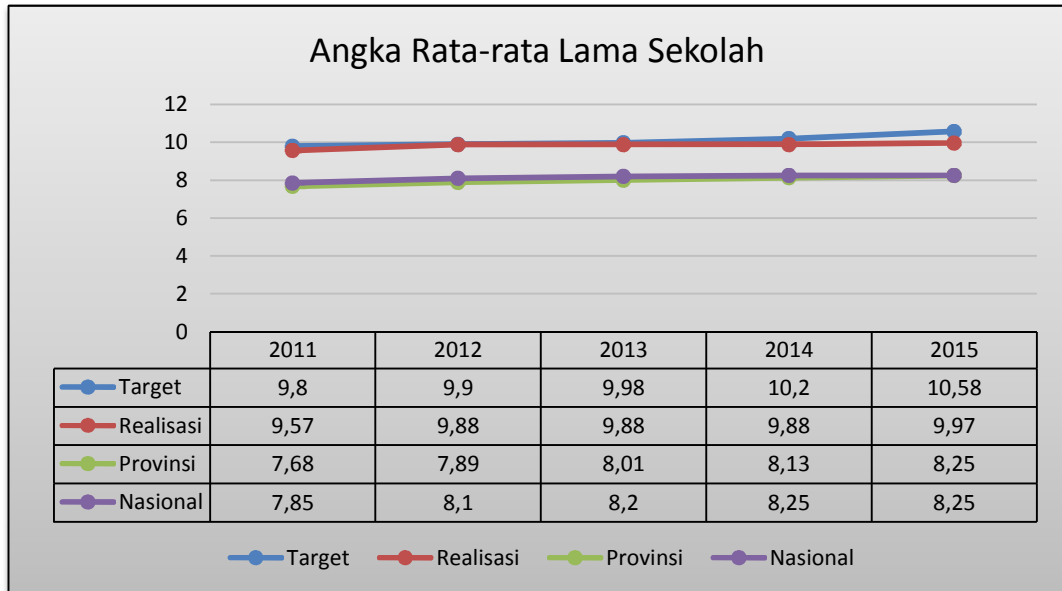
Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
Angka rata – rata lama sekolah	10,58	Thn	9.97*	Thn	94,23

*Angka Prakiraan sumber BPS Kota Banjarmasin

Angka Rata-rata Lama Sekolah digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal pada suatu daerah, tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Kalau dilihat pada tabel diatas capaian kinerja Cuma sebesar 94,23 persen, akan tetapi realisasi angka rata-rata lama sekolah sebesar 9,97 tahun sudah diatas realisasi provinsi yang cuma sebesar 8.25 tahun bahkan target nasional sebesar 8.25 tahun. Jika dilihat angka rata-rata lama sekolah tersebut maka di kota Banjarmasin rata-rata orang bersekolah hanya sampai jenjang kelas 1 SMA, hal

ini sudah diatas rata-rata provinsi yang hanya sampai kelas 3 SMP saja.

Data Capaian Kinerja Indikator 32 Sasaran 11 selama 5 tahun terakhir bisa dilihat dari grafik berikut :



Selama 5 (lima) tahun masa periode RPJMD Kota Banjarmasin,



Angka Rata-Rata Lama Sekolah masyarakat sudah menunjukkan tren peningkatan, walaupun sempat stagnan dari tahun 2012 hingga tahun 2014 pada angka 9,88 namun pada tahun 2015 meningkat kembali pada angka 9,97 tahun.

Dinas Pendidikan perlu melakukan kajian lebih lanjut indikator-indikator yang memiliki daya ungkit yang besar untuk mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah masyarakat sehingga dapat memenuhi atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah untuk provinsi Kalimantan Selatan maka Kota Banjarmasin sudah melebihi sebesar 1,72 tahun begitu juga dengan target nasional maka Kota Banjarmasin sudah melebihi angka 1,72 tahun dari rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat

pendidikan masyarakat Banjarmasin relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Capaian tersebut di atas tidak lepas dari peran Dinas Pendidikan dalam menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun melalui beberapa kegiatan, antara lain :

- a. Peningkatan aksesibilitas, melalui : pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), mengurangi angka putus sekolah, pendirian SMP Terbuka, serta mengefektifkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam menjaring anak tidak sekolah dan anak putus sekolah untuk mendapat pendidikan kesetaraan melalui kegiatan Paket A, B, dan C.
- b. Peningkatan mutu pembelajaran, karena dengan mutu pembelajaran yang baik siswa akan termotivasi kuat untuk meneruskan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.
- c. Penguatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk dapat melaksanakan pendidikan secara lebih baik dan profesional, termasuk dalam memahami kurikulum dan menerapkannya di kelas secara lebih baik.

4. Angka partisipasi sekolah (APS)

Tabel 3.6
Persentase Capaian Kinerja Indikator 2.2 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
Angka partisipasi sekolah					
- SD (Usia 7-12)	100,01	%	115.71	%	115,69
- SMP (Usia 13-15)	99,87	%	116.28	%	116,43
- SMA (Usia 16-18)	51,9	%	95.72	%	184,43
Rata-rata capaian					218,55

Realisasi angka partisipasi sekolah berdasarkan:



Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses

penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Pada Tahun 2015 Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mendapatkan Dana Hibah dari Uni Eropa untuk Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar, hal ini cukup memberikan sumbangan yang signifikan dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah.

Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dimana untuk menaikkan angka partisipasi sekolah (APS) didasarkan pada penambahan ruang kelas, rehab sedang/berat ruang kelas dan perbaikan sarana prasarana pendukungnya untuk setiap jenjang pendidikan. sehingga penambahan jumlah siswa dapat tertampung oleh sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah untuk usia sekolah tingkat SD adalah sebagai berikut :

$$APS (7-12) = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 yang sedang sekolah di SD+MI+SLTP+MTs}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$$

$$APS (7-12) = \frac{78.530}{67.867} \times 100\%$$

$$APS (7-12) = 115.71\%$$

Pada tingkat APS 7-12 (Tingkat SD) Kota Banjarmasin capaian pada tahun 2015 sebesar 115,71%. Tingginya capaian ini mengindikasikan bahwa Kota Banjarmasin telah dapat memberikan layanan pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah dasar (7-12 tahun). Capaian yang melebihi angka 100% disebabkan siswa usia 7-12 tahun yang bersekolah di Banjarmasin tidak hanya berasal dari Kota Banjarmasin saja tetapi juga berasal dari daerah sekitar Banjarmasin. Ini juga mengindikasikan bahwa mutu pendidikan di Kota Banjarmasin sudah dipandang lebih baik oleh masyarakat di luar Kota Banjarmasin.

Angka Partisipasi Sekolah untuk usia sekolah tingkat SMP adalah sebagai berikut :

$$APS (13-15) = \frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 yang sedang sekolah di SD+MI+SLTP+MTs+SLTA}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$$

$$APS (13-15) = \frac{28.641}{31.177} \times 100\%$$

$$APS (13-15) = 116.28\%$$

Pada APS 13-15 tahun tingkat SMP Kota Banjarmasin capaian pada tahun 2015 sebesar 115,70%. Capaian yang melebihi angka 100% ini disebabkan siswa usia 13-15 tahun yang bersekolah di Banjarmasin tidak hanya berasal dari Kota Banjarmasin saja tetapi juga berasal dari daerah sekitar Banjarmasin. Ini juga mengindikasikan bahwa mutu pendidikan di Kota Banjarmasin sudah dipandang lebih baik oleh masyarakat di luar Kota Banjarmasin. Berdasarkan perhitungan, ada sekitar 1.59 persen anak yang masih masuk hitungan usia SD tetapi sudah bersekolah di SMP. Hal ini disebabkan karena siswa yang berusia 6 tahun sudah diperbolehkan masuk ke sekolah dasar sehingga usia 12 tahun mereka sudah duduk di SMP. Selain itu, masih ada juga anak yang berusia tingkat SMP tetapi masih bersekolah di tingkat Pendidikan Dasar sekitar 20 persen hal ini perlu perhatian lebih juga dari Dinas Pendidikan sebagai instansi yang mengurus bidang pendidikan di Kota Banjarmasin. Secara keseluruhan Dinas Pendidikan sudah berperan secara maksimal dalam memajukan

pendidikan di Kota Banjarmasin dengan aturan yang mengharuskan seluruh anak harus tetap bersekolah.

Angka Partisipasi Sekolah untuk usia sekolah tingkat SMA adalah sebagai berikut :

$$APS (16-18) = \frac{\text{Jumlah anak usia 16-18 yang sedang sekolah di SLTP+MTs+SMA+SMK+MA}}{\text{Jumlah penduduk usia 16-18 tahun}} \times 100\%$$

$$APS (16-18) = \frac{32.653}{34.113} \times 100\%$$

$$APS (16-18) = 95.72\%$$

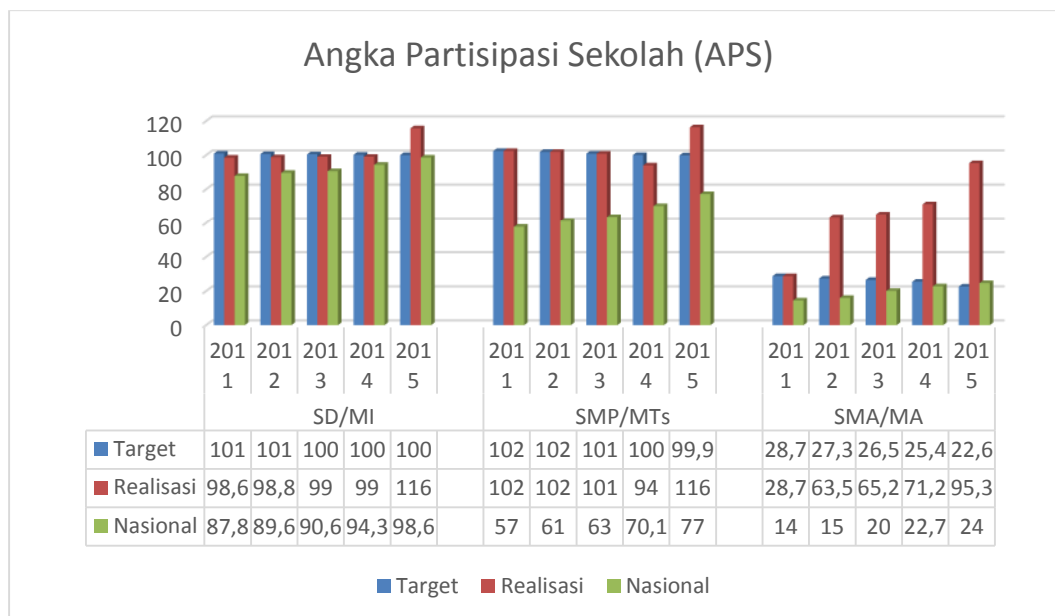
Pada APS 16-18 setingkat SMA, capaian Kota Banjarmasin sebesar 95,72%. Capaian ini disebabkan terdapat anak dengan usia ≤ 15 tahun yang sudah bersekolah di tingkat SMA sebagai dampak usia masuk SD yang kurang dari 7 tahun. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang SLTA di Kota Banjarmasin sudah sangat baik. Dapat dilihat dari data tersebut di Kota Banjarmasin akses pendidikan berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat tidak memandang usia untuk bisa bersekolah pada setiap jenjang pendidikan. Berdasarkan pada tabel diatas, rata – rata persentase capaian kinerja Kota Banjarmasin untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah adalah 218.55 persen.



Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun 2014 sebesar 157.52 maka pada tahun 2015 ini terjadi kenaikan sebesar 61.83 persen. Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa dengan

Kategori capaian kinerja Sangat Berhasil, untuk tingkat Usia sekolah SMA sederajat APS 16-18 terjadi peningkatan yang paling tinggi.

Data Capaian Kinerja Indikator Sasaran 11 selama 5 tahun terakhir bisa dilihat dari grafik berikut :



Dilihat dari perbandingan capaian kinerja untuk APS maka realisasi untuk Kota Banjarmasin sudah melebihi target akhir RPJM dimana APS SD/MI 100 persen maka realisasi 116 persen sudah melebihi 16 persen, begitu pula dengan target nasional pada tahun 2015 maka Kota Banjarmasin sudah melebihi 17,4 persen dari target rata-rata nasional. Untuk APS tingkat SMP/MTs Kota Banjarmasin dari tahun 2011 sudah melebihi dari target RPJM dan juga target nasional dengan Realisasi akhir pada tahun 2015 sudah mencapai 116,43 persen dibanding dengan target 99,9 persen atau melebihi 16,1 persen begitu juga jika dibandingkan dengan target nasional 77 persen maka Kota Banjarmasin sudah melebihi 39 persen.

Sementara untuk APS tingkat SMA/MA capaian yang didapat sudah sangat melebihi jika dibandingkan dengan target 22,6 persen maka capaiannya sudah sebesar 95,3 persen atau



melebihi 72,7 persen suatu prestasi yang luar biasa yang dicapai dalam waktu 5 tahun sejak tahun 2011. Keberhasilan pada setiap indikator APS pada setiap jenjang merupakan bukti keberhasilan

program kegiatan yang dilakukan oleh dinas pendidikan sebagai leading sektor pendidikan seperti melakukan pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, melakukan rehabilitasi sedang/berat bangunan dan ruang kelas sekolah, penambahan sarana prasarana pendidikan pada setiap jenjang, pembinaan murid pada bidang olah raga, kesenian dan ketrampilan, meningkatkan kualitas para pendidik dan tenaga kependidikan serta meningkatkan kualitas manajemen sekolah dengan melaksanakan akreditasi sekolah secara rutin.

5. Angka partisipasi murni (APM)

Tabel 3.7

Persentase Capaian Kinerja Indikator 2.3 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
Angka partisipasi murni					
- SD	88,42	%	114.85	%	129,89
- SMP/MTs	77,62	%	98.75	%	127.22
- SMA/MA	34,45	%	82.09	%	238,29
Rata-rata capaian					165.13

Angka Partisipasi Murni untuk usia sekolah tingkat SD adalah sebagai berikut :

$$APM \text{ SD/MI} = \frac{\text{Jumlah Siswa di SD+MI yang berusia 2-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$$

$$APS \text{ SD/MI} = \frac{77.945}{67.867} \times 100\%$$

$$APS \text{ SD/MI} = 114.85\%$$

Angka Partisipasi Sekolah untuk usia sekolah tingkat SMP adalah sebagai berikut :

$$APM \text{ SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah Siswa di SLTP+MTs yang berusia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 12-15 tahun}} \times 100\%$$

$$APM \text{ SMP/MTs} = \frac{30.788}{31.177} \times 100\%$$

$$APM \text{ SMP/MTs} = 98.75\%$$

Angka Partisipasi Sekolah untuk usia sekolah tingkat SMA adalah sebagai berikut :

$$\text{APM SMA/SMK/MA} = \frac{\text{Jumlah Siswa SMA+SMK+MA yang berusia 16-18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 16-18 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{APM SMA/SMK/MA} = \frac{28.003}{34.113} \times 100\%$$

$$\text{APM SMA/SMK/MA} = 82.09$$

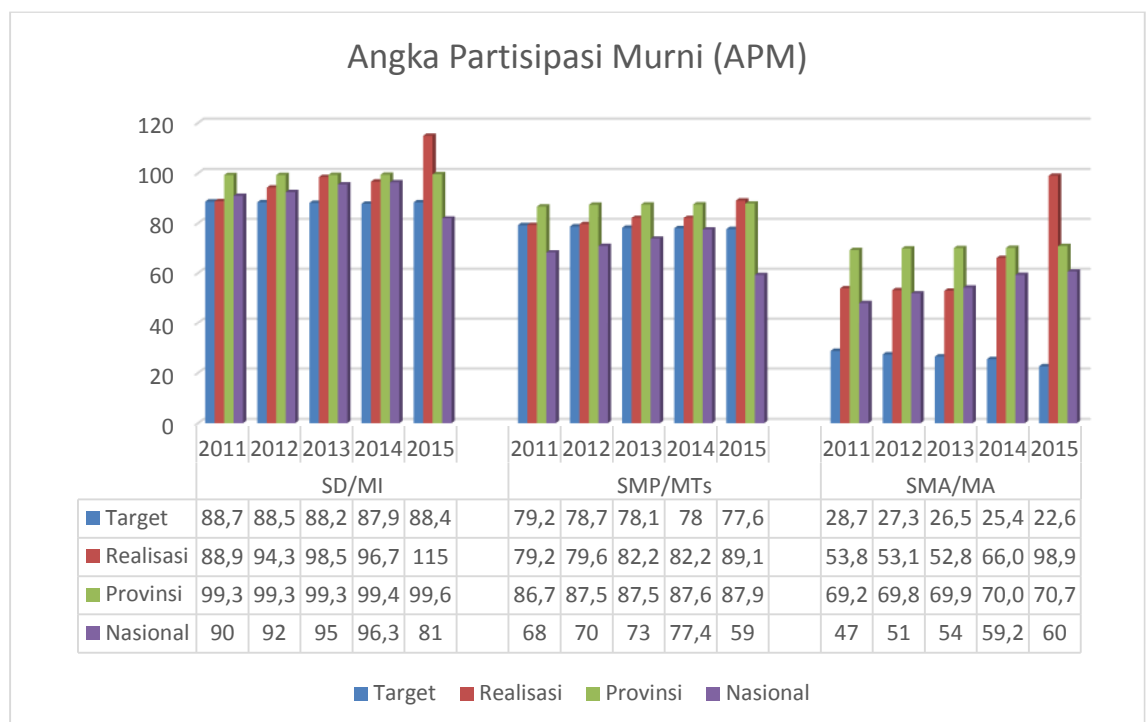
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun. Jika dilihat dari table 84 diatas maka realisasi capaian pada setiap jenjang pendidikan sudah melebihi dari target akhir RPJM Kota Banjarmasin untuk APM tingkat SD capaiannya 129,89 persen, sedang capaian APM pada jenjang SMP/MTs mencapai 127,22 persen, pada jenjang APM SMA/MA capaiannya bahkan 238,29 persen. Berhasilnya capaian kinerja pada semua jenjang pendidikan merupakan buah kerja keras Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam menerapkan program dan kegiatan yang tepat seperti pemberian BOSDA untuk seluruh siswa tingkat SD/SMP



Negeri dan Swasta, melakukan pembangunan Sekolah baru, penambahan ruang kelas, rehabilitasi sedang/berat sekolah dan ruang kelas, pembenahan manajemen sekolah dengan

sistem MBS (manajemen berbasis sekolah) serta menerapkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada seluruh sekolah tingkat dasar (SD/SMP). Pada jenjang SMA kebijakan yang diambil untuk meningkatkan APM seperti pemberian beasiswa untuk masyarakat miskin (BSM), menambah ruang kelas baru, penambahan fasilitas sekolah seperti pengadaan ruangan laboratorium (TIK, Fisika, Kimia, Biologi dan Bahasa), perpustakaan dan pembuatan jalan untuk akses ke sekolah dengan bekerjasama dengan Dinas Bina Marga.

Data Capaian Kinerja Indikator 34 Sasaran 11 selama 5 tahun terakhir bisa dilihat dari grafik berikut :



Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD dari target awal 88,7 persen tahun 2011 pada realisasinya selalu naik secara konstan hingga pada tahun 2015 dari target 88,4 persen terealisasi sebesar 115 persen atau melebihi 26,6 persen dan jika dibandingkan dengan capaian APM provinsi pada tahun 2011 yang sudah sebesar 99,3 persen maka APM Kota Banjarmasin jauh tertinggal karena hanya sebesar 88,7 persen akan tetapi pada realisasi APM pada akhir RPJMD Kota Banjarmasin sebesar 99,6 persen maka Kota Banjarmasin bias mengejar ketertinggalan dengan melebihi APM provinsi sebesar 15,4 persen. Begitu juga kalau dibandingkan dengan target nasional maka APK Kota Banjarmasin jauh melebihi sebesar 34 persen suatu prestasi yang membanggakan bagi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebagai penanggungjawab urusan pendidikan. Untuk APM jenjang SMP/MTs Kota Banjarmasin pada awal realisasi tahun 2011 sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan APM provinsi tahun 2011 sebesar 10,4 persen dimana ketertinggal tersebut menjadi pemacu kerja keras Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan menerapkan Program dan Kegiatan secara simultan untuk meningkatkan APM jenjang SMP/MTs. Sehingga pada akhir realisasi RPJMD Kota Banjarmasin capaian kinerja Dinas Pendidikan terlihat hasilnya dengan APM sebesar 89,1 persen melampaui realisasi APM provinsi sebesar 1,2 persen atau secara keseluruhan dalam waktu 5 tahun menaikkan 9,9 persen dan dapat melampaui rata-rata APM Provinsi. APM jenjang SMA/MA Kota

Banjarmasin pada awal realisasi hanya sebesar 53,8 persen, angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian APM provinsi yang sudah sebesar 69,2 persen. Dengan segala upaya dinas pendidikan akhirnya berusaha terus meningkatkan APM jenjang SMA/MA untuk setiap tahunnya. Pada akhir realisasi RPJMD maka APM untuk jenjang SMA/MA Kota Banjarmasin dapat meningkatkan secara signifikan dan jauh melebihi APM provinsi sebesar 28,2 persen dimana APM jenjang SMA/MA kota Banjarmasin mencapai sebesar 98,9 persen.

6. Angka Partisipasi Kasar

Tabel 3.8
Persentase Capaian Kinerja Indikator 2.4 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
Angka partisipasi kasar					
- SD	104,86	%	126.25	%	120,40
- SMP/MTs	112,9	%	105.51	%	93.45
- SMA/SMK	51,9	%	91.22	%	175.76
Rata-rata capaian					129.87

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang

pendidikannya.

Angka Partisipasi

Kasar (APK)

merupakan

persentase

jumlah penduduk

yang sedang

bersekolah pada

suatu jenjang

pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.



Berdasarkan pada tabel diatas, rata – rata capaian angka partisipasi kasar adalah 129.87 persen, dimana pada seluruh tingkatan pendidikan sudah melebihi target RPJMD dan juga diatas target Nasional, hal ini merupakan hasil dari kerja keras semua pihak. Jika dibandingkan dengan hasil capaian pada tahun 2014 maka capaian sekarang sudah melebihi 16,56 persen dimana rata-rata capaian APK untuk semua jenjang pendidikan telah menacapai 129,27. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Angka Partisipasi Kasar untuk usia sekolah tingkat SD adalah sebagai berikut :

$$APK\ SD/MI = \frac{Jumlah\ Siswa\ di\ SD+MI}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 7-12\ tahun} \times 100\%$$

$$APK\ SD/MI = \frac{85.683}{67.867} \times 100\%$$

$$APK\ SD/MI = 126.26$$

Angka Partisipasi Kasar untuk usia sekolah tingkat SMP adalah sebagai berikut :

$$APK\ SMP/MTs = \frac{Jumlah\ Siswa\ di\ SLTP+MTs}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 12-15\ tahun} \times 100\%$$

$$APK\ SMP/MTs = \frac{32.896}{31.177} \times 100\%$$

$$APK\ SMP/MTs = 105.5$$

Angka Partisipasi Kasar untuk usia sekolah tingkat SMA adalah sebagai berikut :

$$\text{APK SMA/SMK/MA} = \frac{\text{Jumlah Siswa SMA+SMK+MA}}{\text{Jumlah penduduk usia 16-18 tahun}} \times 100\%$$

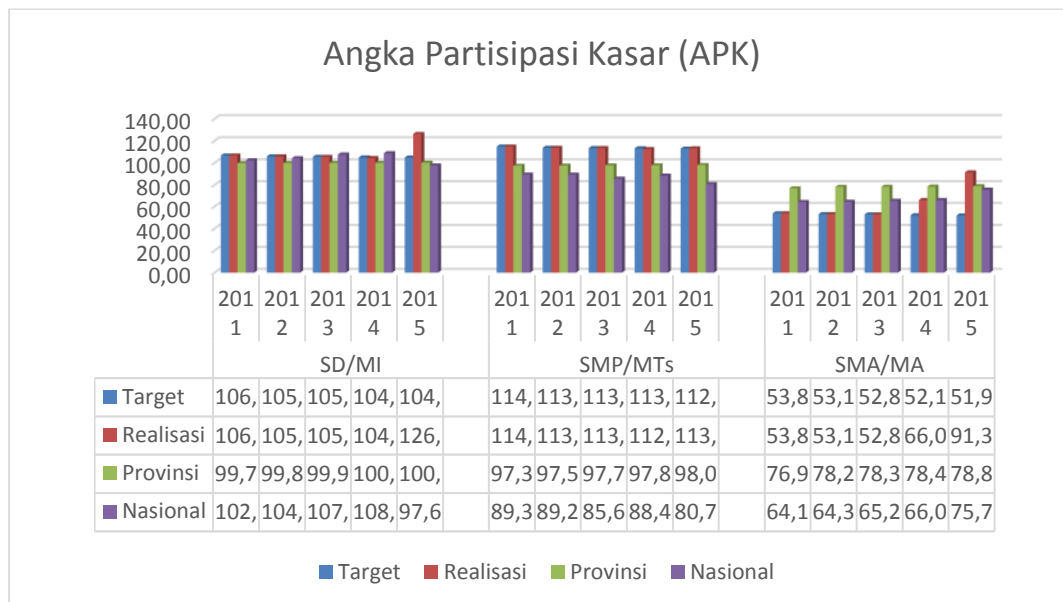
$$\text{APK SMA/SMK/MA} = \frac{33.762}{34.113} \times 100\%$$

$$\text{APK SMA/SMK/MA} = 91.22$$

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk menaikkan angka partisipasi Kasar (APK) didasarkan pada penambahan ruang kelas, penambahan sarana prasarana pendukungnya untuk setiap jenjang pendidikan selain itu juga melakukan perbaikan segala sarana dan prasarana yang ada sehingga setiap ada penerimaan siswa baru dapat tertampung dengan maksimal dan setiap peserta didik mendapat fasilitas sesuai dengan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan BNSP untuk jenjang pendidikan menengah. Proses penerimaan siswa baru juga dirombak dengan melakukan system online sehingga kualitas peserta didik baru dapat dipertahankan dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kota Banjarmasin. Akan tetapi pada jenjang pendidikan SMK masih terdapat APK yang rendah untuk lingkup kecamatan dimana belum meratanya jumlah SMK pada masing-masing kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin, bahkan di Kecamatan Banjarmasin Selatan belum ada satupun SMK Negeri dibangun oleh karrena itu sesuai dengan anjuran BPS Kota Banjarmasin untuk meningkatkan APK jenjang SMK tersebut perlu adanya pembangunan SMKN baru pada Kecamatan Banjarmasin Selatan.



Data Capaian Kinerja Indikator 2.4 Sasaran 2 selama 5 tahun terakhir bisa dilihat dari grafik berikut :



Realisasi tahun 2011-2015 APK pada jenjang pendidikan dasar SD/MI/SMP/MTs sudah melebihi realisasi APK provinsi Kalimantan Selatan hal ini bisa dilihat pada table realisasi selama 5 tahun tersebut, dimana pada akhir periode RPJMD Kota Banjarmasin APK untuk 2 indikator jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs) sudah jauh melebihi APK provinsi. Untuk APK SD/MI sudah melebihi angka 26 persen sedangkan APK SMP/MTs lebih 15 persen dari realisasi APK provinsi. Akan tetapi pada APK jenjang SMA/MA realiasi pada awal RPJMD hanya 53.8 persen jauh jika dibandingkan dengan realisasi provinsi terpaut 23,1 persen, sehubungan dengan rendahnya APK SMA/MA tersebut maka dinas pendidikan kota Banjarmasin selaku penanggungjawab urusan pendidikan menjalankan program dan kegiatan yang dianggap mampu untuk meningkatkan APK kota Banjarmasin, sehingga dengan kerja keras seluruh komunitas pendidikan yang ada baik itu pegawai dinas pendidikan, guru dan pemerintah kota Banjarmasin selaku pemegang kebijakan akhirnya dapat mengejar ketertinggal APK jenjang

SD/MI,SMP/MTs/SMA/MA pada akhir masa RPJMD Kota Banjarmasin dengan selisih yang cukup besar dengan APK provinsi dan nasional.

7. Jumlah Guru berkualifikasi

Tabel 3.9
Persentase Capaian Kinerja Indikator 3.1 Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
3.1	Jumlah Guru berkualifikasi					
	- PNS	830	Org	2,995	Org	360.84
	- Non PNS	390	Org	761	Org	195.13
Rata-rata capaian						277.99

Dari data diatas terlihat bahwa di Kota Banjarmasin jumlah guru yang sudah memiliki kompetensi sertifikasi Guru sudah melebihi dari yang ditargetkan dengan capaian 360,84 persen untuk guru berstatus PNS sedangkan guru yang Non PNS juga telah melebihi target dengan capaian kinerja 194,13 persen. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan Dinas Pendidikan sebagai penanggungjawab urusan pendidikan dalam menjalankan program dan kegiatan selama tahun 2015. Data Capaian Kinerja Indikator 2.4 Sasaran 2 selama 5 tahun terakhir bisa dilihat dari grafik berikut :



Berdasarkan grafik diatas terlihat capaian terlihat trend peningkatan capaian kinerja untuk IKU indicator 2.4 sasaran 2 yang sangat signifikan dimana setiap tahun terus terjadi peningkatan bahkan pada akhir masa RENSTRA Dinas Pendidikan dari yang ditargetkan 100 persen atau 830 orang yang mendapatkan sertifikasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin berhasil mencapai 360 persen atau 2,995 orang guru bersertifikasi untuk guru PNS sedangkan guru non PNS juga terjadi peningkatan dari ditargetkan 390 orang atau 100 persen, pencapaiannya sebesar 195 persen atau terjadi peningkatan 371 orang guru non PNS yang lulus sertifikasi.

8. Rasio Guru Assesor

Berdasarkan kebutuhan akan guru assesor untuk Kota Banjarmasin dimana 10 (sepuluh) orang guru harus ada 1 (satu) orang guru assesor maka Kota Banjarmasin masih belum dapat memenuhi target tersebut, hal ini dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah :

Tabel 3.10
Persentase Capaian Kinerja Indikator 3.2 Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
3.2	Rasio Guru Assesor	30.6	%	18.76	%	61.31

Terlihat untuk tahun 2015 capaian realisasi kinerjanya hanya 61,31 persen dengan kualifikasi capaian “rendah”. Hal ini disebabkan belum terlaksananya Program dan Kegiatan yang ada pada bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melakukan sosialisasi kepada tenaga kependidikan di Kota Banjarmasin dan kurang koordinasinya antara Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan LPMP yang menyelenggarakan pendidikan dan pembekalan PK assesor guru. Diharapkan pada tahun berikutnya bidang yang menangani dapat mengejar ketertinggalan capaian kinerjanya.

9. Persentasi Rata-Rata SPM

Pada tahun 2015 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mendapat bantuan dana APBN untuk persepatan pencapaian SPM bidang pendidikan dasar, dimana pada pelaksanaannya Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mendapat bantuan tenaga konsultan dari Perguruan Tinggi yang mendapat kewenangan untuk dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu memetakan dan mengarahkan percepatan pencapaian SPM untuk pendidikan dasar. Pencapaian SPM pendidikan merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan sarana dan prasarana minimal yang harus didapatkan oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014.

Tabel 3.11

Persentase Capaian Kinerja Indikator 4.1 Sasaran 4

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
4.1	Persentasi Rata-Rata SPM	50	%	68	%	136.00

da tahun 2015 capaian kinerja untuk indicator 4.1 sasaran 4 pada IKU Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sudah melampaui dari target 50 dengan realisasi 68 persen atau capaiannya 136 persen dari yang ditargetkan. Dilihat dari capaian yang sangat besar tersebut merupakan hasil bidang pendidikan dasar yang menangani program dan kegiatan tersebut dengan kerja keras dan kerjasama dengan seluruh sekolah lingkup pendidikan dasar yang menjadi binaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Hasil Capaian 68 persen tersebut menjadikan Kota Banjarmasin berada di peringkat 2 untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan diatas rata-rata Nasional yang Cuma 58 persen.

10. Persentasi Sekolah sesuai BNSP

Tabel 3.12

Persentase Capaian Kinerja Indikator 4.2 Sasaran 4

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
4.2	Persentasi Sekolah sesuai BNSP	95	%	98	%	103.16

Dinas Pendidikan sebagai penanggungjawab urusan wajib bidang pendidikan sudah melaksanakan tupoksinya dengan menjalankan strategi peningkatan mutu pendidikan di Kota Banjarmasin sesuai Program dan Kegiatan yang ada. Dimana kalau dilihat dari hasil capaian persentasi sekolah menengah yang sudah melaksanakan pelayanan pada sekolah sesuai BNSP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Dimana capaian sebesar 103,16 persen suatu prestasi yang membanggakan atau kategori “Sangat Tinggi”.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada masa akhir RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun ke 5 (lima) ini secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2015 mencapai 87.52 persen untuk keuangan sedangkan secara fisik mencapai 87.63 persen, hal ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh warga dinas pendidikan baik dari level eselon tertinggi sampai level staf/pelaksana dengan kekompakan dan tanpa mengenal lelah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Banjarmasin. Anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 66,037,153,050,-

dimana secara angka serapannya sebesar Rp. 57,795,164,208,- dengan silpa sebesar Rp. 8,241,988,842,-. Untuk lebih detail serapan anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini :

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN		
		NILAI DPA Rp	REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	
1	2	3	7	10
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	742,213,000	575,286,055	166,926,945.00
2	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,263,960,000	2,971,754,267	292,205,733.00
3	Inventaris Barang Aset Daerah	210,900,000	210,900,000	0.00
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	750,000,000	663,838,000	86,162,000.00
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	655,389,000	565,265,000	90,124,000.00
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	369,100,000	361,446,100	7,653,900.00
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
7	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	5,413,850	5,413,850	0.00
D	Program Pendidikan Anak Usia Dini			
8	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	3,100,000,000	3,013,600,000	86,400,000.00
E	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			
9	Pembangunan Gedung Sekolah	10,634,475,000	9,723,422,000	911,053,000.00
10	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	1,850,000,000	1,821,417,000	28,583,000.00
11	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	187,500,000	183,197,000	4,303,000.00
12	Pengadaan Mebeluer Sekolah	750,000,000	656,728,000	93,272,000.00
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	2,000,000,000	1,950,923,000	49,077,000.00
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	750,000,000	680,053,000	69,947,000.00
15	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	300,000,000	265,220,000	34,780,000.00
16	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs	497,400,000	359,747,500	137,652,500.00
17	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	199,810,000	168,850,000	30,960,000.00
18	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	387,975,000	328,601,000	59,374,000.00
19	Penyelenggaraan Ujian Nasional untuk Pendidikan Dasar	372,480,000	303,132,000	69,348,000.00
20	Pembangunan Pagar Sekolah	2,000,000,000	1,672,658,000	327,342,000.00
21	Penyelenggaraan Kinerja Kepala Sekolah	122,100,000	105,150,000	16,950,000.00
22	Pengadaan Lomba-Lomba	278,925,000	252,625,000	26,300,000.00
23	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Surgi Mufti 1 Banjarmasin	111,400,000	110,000,000	1,400,000.00

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN		
		NILAI DPA Rp	REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	
1	2	3	7	10
24	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Surgi Mufti 4 Banjarmasin	44,400,000	44,400,000	0.00
25	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Jingah 1 Banjarmasin	23,200,000	23,200,000	0.00
26	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Jingah 4 Banjarmasin	85,000,000	83,832,500	1,167,500.00
27	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Jingah 5 Banjarmasin	133,600,000	128,240,000	5,360,000.00
28	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Jingah 6 Banjarmasin	28,400,000	26,950,000	1,450,000.00
29	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Jingah 7 Banjarmasin	43,200,000	35,740,000	7,460,000.00
30	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Surgi Mufti 5 Banjarmasin	49,800,000	49,348,775	451,225.00
31	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Antasan Kecil Timur 1 Banjarmasin	59,800,000	59,800,000	0.00
32	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Antasan Kecil Timur 3 Banjarmasin	33,000,000	18,271,700	14,728,300.00
33	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Antasan Kecil Timur 4 Banjarmasin	20,200,000	17,309,950	2,890,050.00
34	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai 1 Banjarmasin	35,800,000	35,800,000	0.00
35	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai 2 Banjarmasin	43,200,000	39,391,000	3,809,000.00
36	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai 4 Banjarmasin	33,800,000	33,800,000	0.00
37	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai 5 Banjarmasin	89,000,000	88,989,700	10,300.00
38	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai 7 Banjarmasin	82,200,000	81,755,000	445,000.00
39	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai 8 Banjarmasin	32,400,000	27,912,000	4,488,000.00
40	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai 10 Banjarmasin	84,600,000	82,530,000	2,070,000.00
41	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Sungai Miai 11 Banjarmasin	84,000,000	82,400,000	1,600,000.00
42	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pangeran 1	38,000,000	33,342,000	4,658,000.00
43	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pangeran 2	23,000,000	23,000,000	0.00
44	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pangeran 3	23,000,000	23,000,000	0.00
45	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin Utara 1	46,600,000	38,208,200	8,391,800.00
46	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin Utara 4	69,600,000	56,121,750	13,478,250.00
47	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin Utara 5	42,600,000	41,520,000	1,080,000.00
48	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin Utara 6	38,200,000	38,200,000	0.00
49	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Kuin Utara 7	44,600,000	44,600,000	0.00
50	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak Selatan 3	44,200,000	42,820,000	1,380,000.00
51	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak Selatan 4	42,200,000	41,745,000	455,000.00
52	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak Selatan 1	40,600,000	40,569,900	30,100.00
53	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak Selatan 2	45,000,000	45,000,000	0.00
54	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak Tengah 1	49,400,000	40,005,000	9,395,000.00
55	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak Tengah 2	30,600,000	29,749,600	850,400.00
56	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak Tengah 3	63,400,000	63,400,000	0.00
57	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak Tengah 4	55,000,000	55,000,000	0.00
58	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak Utara 1	69,000,000	69,000,000	0.00
59	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak Utara 2	40,600,000	38,245,000	2,355,000.00
60	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Alalak Utara 3	40,200,000	37,881,000	2,319,000.00
61	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Mawar 2	87,200,000	87,200,000	0.00

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN		
		NILAI DPA Rp	REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	
1	2	3	7	10
62	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Mawar 4	41,200,000	37,545,000	3,655,000.00
63	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Mawar 6	31,000,000	26,600,000	4,400,000.00
64	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Mawar 7	82,000,000	70,220,000	11,780,000.00
65	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Mawar 8	24,000,000	20,890,000	3,110,000.00
66	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Dalam 1	72,200,000	67,358,500	4,841,500.00
67	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Dalam 3	154,200,000	125,544,000	28,656,000.00
68	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Dalam 6	42,800,000	41,547,750	1,252,250.00
69	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Dalam 7	67,800,000	46,151,200	21,648,800.00
70	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Dalam 9	32,400,000	25,370,000	7,030,000.00
71	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Dalam 10	25,800,000	22,260,000	3,540,000.00
72	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Dalam 11	30,800,000	30,800,000	0.00
73	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Teluk Dalam 12	39,600,000	26,718,500	12,881,500.00
74	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Antasan Besar 1	55,800,000	47,707,500	8,092,500.00
75	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Antasan Besar 7	117,200,000	117,200,000	0.00
76	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pasar Lama 1	125,600,000	119,568,000	6,032,000.00
77	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pasar Lama 3	98,200,000	83,595,500	14,604,500.00
78	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Pasar Lama 6	31,800,000	24,191,000	7,609,000.00
79	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Seberang Mesjid 1	112,000,000	112,000,000	0.00
80	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Seberang Mesjid 5	30,200,000	26,575,000	3,625,000.00
81	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Melayu 2	53,800,000	52,312,000	1,488,000.00
82	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Melayu 5	30,600,000	30,000,000	600,000.00
83	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Melayu 6	46,400,000	21,031,200	25,368,800.00
84	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Melayu 7	34,200,000	24,780,000	9,420,000.00
85	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Melayu 11	24,400,000	16,794,750	7,605,250.00
86	Kegiatan Operasional Sekolah SD Negeri Gadang 2	64,800,000	64,300,000	500,000.00
87	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pengambangan 3	66,600,000	66,595,000	5,000.00
88	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pengambangan 5	72,800,000	72,600,000	200,000.00
89	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pengambangan 6	38,000,000	37,400,000	600,000.00
90	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pengambangan 8	59,800,000	59,710,000	90,000.00
91	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pengambangan 9	42,800,000	42,800,000	0.00
92	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pengambangan 10	11,200,000	11,158,000	42,000.00
93	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Benua Anyar 2	19,800,000	18,624,200	1,175,800.00
94	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Benua Anyar 3	18,200,000	18,105,000	95,000.00
95	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Benua Anyar 4	34,800,000	25,276,000	9,524,000.00
96	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Benua Anyar 8	44,200,000	44,200,000	0.00
97	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Benua Anyar 9	16,800,000	16,800,000	0.00
98	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Benua Anyar 10	40,600,000	40,600,000	0.00
99	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Karang Mekar 1	119,200,000	119,200,000	0.00
100	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Karang Mekar 4	41,400,000	40,583,900	816,100.00
101	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Karang Mekar 5	93,000,000	91,200,000	1,800,000.00
102	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Karang Mekar 6	76,800,000	74,419,600	2,380,400.00
103	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Karang Mekar 8	28,800,000	28,785,000	15,000.00
104	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Karang Mekar 9	54,400,000	47,117,500	7,282,500.00
105	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kebun Bunga 1	69,400,000	67,806,000	1,594,000.00
106	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kebun Bunga 3	55,800,000	55,800,000	0.00
107	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kebun Bunga 4	77,600,000	72,158,000	5,442,000.00
108	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kebun Bunga 5	68,200,000	68,200,000	0.00
109	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kebun Bunga 6	61,600,000	61,410,000	190,000.00
110	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kebun Bunga 9	31,000,000	30,800,000	200,000.00
111	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Sungai Bilu 1	82,600,000	76,501,000	6,099,000.00
112	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Sungai Bilu 3	55,800,000	53,740,000	2,060,000.00
113	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Sungai Lutut 1	47,600,000	47,300,000	300,000.00
114	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Sungai Lutut 3	21,400,000	21,400,000	0.00
115	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Sungai Lutut 4	26,600,000	26,535,000	65,000.00
116	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Sungai Lutut 5	42,400,000	42,400,000	0.00

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN		
		NILAI DPA Rp	REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	
1	2	3	7	10
117	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Sungai Lulut 6	39,400,000	39,400,000	0.00
118	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Sungai Lulut 7	25,000,000	25,000,000	0.00
119	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Sungai Lulut 8	44,600,000	42,350,800	2,249,200.00
120	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pekapuran Raya 1	32,600,000	28,615,000	3,985,000.00
121	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pekapuran Raya 2	32,200,000	28,429,400	3,770,600.00
122	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pekapuran Raya 3	66,000,000	63,010,000	2,990,000.00
123	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pekapuran Raya 5	31,000,000	26,698,900	4,301,100.00
124	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kuripan 1	45,000,000	44,993,500	6,500.00
125	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kuripan 2	93,800,000	93,437,500	362,500.00
126	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pemurus Luar 1	62,200,000	61,790,000	410,000.00
127	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Teluk Tiram 1	55,800,000	41,157,500	14,642,500.00
128	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Teluk Tiram 2	65,800,000	36,710,000	29,090,000.00
129	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Teluk Tiram 5	21,400,000	16,906,000	4,494,000.00
130	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Teluk Tiram 6	78,600,000	76,432,000	2,168,000.00
131	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Teluk Tiram 8	41,400,000	38,685,050	2,714,950.00
132	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Belitung Utara 2	40,800,000	38,400,000	2,400,000.00
133	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Belitung Utara 3	34,800,000	32,640,000	2,160,000.00
134	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Belitung Selatan 1	43,800,000	42,450,000	1,350,000.00
135	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Belitung Selatan 2	52,200,000	50,430,550	1,769,450.00
136	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Belitung Selatan 4	30,400,000	27,795,000	2,605,000.00
137	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Belitung Selatan 5	95,000,000	83,000,000	12,000,000.00
138	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Belitung Selatan 7	74,600,000	34,075,000	40,525,000.00
139	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Belitung Selatan 9	29,800,000	25,363,000	4,437,000.00
140	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Telaga Biru 1	83,200,000	83,200,000	0.00
141	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Telaga Biru 4	43,600,000	38,800,000	4,800,000.00
142	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Telaga Biru 5	44,600,000	33,451,000	11,149,000.00
143	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Telaga Biru 6	47,400,000	44,927,900	2,472,100.00
144	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Telaga Biru 8	46,800,000	44,100,000	2,700,000.00
145	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Telaga Biru 9	39,800,000	30,200,000	9,600,000.00
146	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Telaga Biru 10	34,600,000	31,000,000	3,600,000.00
147	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Telawang 1	21,400,000	15,515,000	5,885,000.00
148	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Telawang 3	61,400,000	52,016,000	9,384,000.00
149	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pelambuan 1	84,000,000	53,597,000	30,403,000.00
150	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pelambuan 2	61,000,000	53,215,000	7,785,000.00
151	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pelambuan 4	95,800,000	94,230,000	1,570,000.00
152	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pelambuan 7	59,800,000	46,235,000	13,565,000.00
153	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Basirih 2	42,600,000	35,987,000	6,613,000.00
154	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Basirih 3	77,400,000	75,600,000	1,800,000.00
155	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Basirih 6	60,200,000	57,800,000	2,400,000.00
156	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Basirih 11	42,600,000	40,080,000	2,520,000.00
157	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kuin Selatan 1	81,400,000	76,600,000	4,800,000.00
158	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kuin Selatan 3	34,000,000	30,265,000	3,735,000.00
159	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kuin Selatan 4	46,000,000	44,930,000	1,070,000.00
160	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kuin Cerucuk 4	51,400,000	41,160,000	10,240,000.00
161	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kuin Cerucuk 5	42,000,000	41,280,000	720,000.00
162	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pelambuan	29,800,000	17,950,000	11,850,000.00
163	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Dalam 1	14,400,000	14,256,000	144,000.00
164	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Dalam 4	45,200,000	45,200,000	0.00
165	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Dalam 5	93,400,000	78,315,800	15,084,200.00
166	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Dalam 7	27,800,000	27,244,000	556,000.00
167	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Murung Raya 1	49,400,000	49,320,000	80,000.00
168	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Murung Raya 2	40,400,000	39,200,000	1,200,000.00
169	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Murung Raya 5	30,200,000	30,200,000	0.00

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN		
		NILAI DPA Rp	REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	
1	2	3	7	10
170	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pemurus Baru 1	45,000,000	43,838,000	1,162,000.00
171	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pemurus Baru 2	101,200,000	100,064,300	1,135,700.00
172	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pemurus Baru 3	33,200,000	33,200,000	0.00
173	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Tanjung Pagar 1	47,000,000	37,200,000	9,800,000.00
174	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Tanjung Pagar 4	40,800,000	39,730,000	1,070,000.00
175	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pemurus Dalam 1	26,200,000	25,770,000	430,000.00
176	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Mantuil 2	72,400,000	57,140,700	15,259,300.00
177	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pemurus Dalam 3	40,800,000	40,800,000	0.00
178	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pemurus Dalam 4	19,200,000	18,600,000	600,000.00
179	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pemurus Dalam 5	68,200,000	63,343,800	4,856,200.00
180	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pemurus Dalam 6	39,800,000	39,800,000	0.00
181	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pemurus Dalam 8	32,600,000	30,945,000	1,655,000.00
182	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Timur 3	84,600,000	82,798,000	1,802,000.00
183	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Timur 5	40,800,000	40,600,000	200,000.00
184	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Timur 6	37,800,000	37,285,000	515,000.00
185	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Timur 7	45,400,000	39,951,000	5,449,000.00
186	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Timur 8	40,000,000	39,877,000	123,000.00
187	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Timur 9	21,800,000	21,800,000	0.00
188	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Timur 12	34,400,000	34,400,000	0.00
189	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Timur 13	18,000,000	17,462,000	538,000.00
190	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Barat 1	23,600,000	23,600,000	0.00
191	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Barat 2	67,800,000	67,800,000	0.00
192	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Barat 3	62,600,000	62,600,000	0.00
193	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pekauman 1	66,400,000	66,300,000	100,000.00
194	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pekauman 2	20,000,000	20,000,000	0.00
195	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pekauman 3	35,000,000	33,580,000	1,420,000.00
196	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Selatan 1	35,000,000	33,570,000	1,430,000.00
197	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Selatan 2	36,000,000	28,562,500	7,437,500.00
198	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Selatan 3	59,800,000	50,060,000	9,740,000.00
199	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Selatan 5	46,800,000	46,376,000	424,000.00
200	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Selatan 8	31,200,000	31,200,000	0.00
201	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Selatan 9	33,600,000	33,600,000	0.00
202	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Selatan 10	68,800,000	66,223,750	2,576,250.00
203	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Basirih 1	102,600,000	98,900,000	3,700,000.00
204	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Basirih 5	65,200,000	61,167,200	4,032,800.00
205	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Basirih 8	42,600,000	40,550,000	2,050,000.00
206	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Basirih 10	15,600,000	15,600,000	0.00
207	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Mantuil 1	27,400,000	27,400,000	0.00
208	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Basirih 4	32,000,000	32,000,000	0.00
209	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Mantuil 3	28,000,000	28,000,000	0.00
210	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Mantuil 4	16,800,000	16,750,000	50,000.00
211	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 1	498,600,000	189,883,301	308,716,699.00
212	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 2	412,200,000	389,970,200	22,229,800.00
213	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 3	391,800,000	186,257,000	205,543,000.00
214	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 4	514,200,000	507,000,000	7,200,000.00
215	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 5	498,600,000	491,400,000	7,200,000.00
216	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 6	510,000,000	311,490,450	198,509,550.00
217	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 7	370,200,000	350,684,925	19,515,075.00
218	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 8	460,200,000	458,939,300	1,260,700.00
219	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 9	511,800,000	325,770,000	186,030,000.00
220	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 10	381,600,000	343,508,800	38,091,200.00
221	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 11	386,400,000	378,572,000	7,828,000.00
222	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 12	514,800,000	503,346,880	11,453,120.00

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN		
		NILAI DPA Rp	REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	
1	2	3	7	10
223	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 13	399,000,000	195,310,500	203,689,500.00
224	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 14	368,400,000	368,400,000	0.00
225	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 15	412,800,000	336,326,900	76,473,100.00
226	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 16	220,200,000	214,342,000	5,858,000.00
227	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 17	397,200,000	340,221,550	56,978,450.00
228	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 19	391,800,000	383,965,000	7,835,000.00
229	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 20	307,800,000	305,725,000	2,075,000.00
230	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 21	302,400,000	163,965,000	138,435,000.00
231	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 22	241,200,000	240,290,050	909,950.00
232	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 23	439,800,000	419,709,000	20,091,000.00
233	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 24	344,400,000	214,534,000	129,866,000.00
234	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 25	278,400,000	191,524,380	86,875,620.00
235	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 26	337,800,000	280,869,500	56,930,500.00
236	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 27	340,200,000	338,302,000	1,898,000.00
237	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 28	249,600,000	243,682,800	5,917,200.00
238	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 29	126,000,000	117,446,450	8,553,550.00
239	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 30	371,400,000	276,077,400	95,322,600.00
240	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 31	312,600,000	290,895,800	21,704,200.00
241	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 32	133,200,000	121,180,500	12,019,500.00
242	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 33	321,600,000	314,873,000	6,727,000.00
243	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 34	279,600,000	276,307,000	3,293,000.00
244	Kegiatan Operasional Sekolah SMP N Pelambuan	25,800,000	25,360,000	440,000.00
245	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri Terbuka 01	65,400,000	45,695,000	19,705,000.00
246	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri Terbuka 02	28,200,000	13,130,000	15,070,000.00
247	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri Terbuka 04	20,400,000	13,365,000	7,035,000.00
248	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Selatan 6	28,400,000	23,642,000	4,758,000.00
249	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Tengah 4	66,000,000	62,880,000	3,120,000.00
250	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Tengah 2	12,000,000	12,000,000	0.00
251	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Timur 11	26,600,000	26,600,000	0.00
252	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Timur 2	33,600,000	33,600,000	0.00
253	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pemurus Dalam 7	38,400,000	37,400,000	1,000,000.00
254	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Murung Raya 3	38,000,000	36,800,000	1,200,000.00
255	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri Terbuka 03	12,600,000	12,600,000	0.00
256	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Sungai Lutut 2	66,600,000	59,042,000	7,558,000.00
257	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kelayan Dalam 2	75,600,000	73,288,000	2,312,000.00
258	Kegiatan Operasional Sekolah SMP Negeri 18	310,800,000	301,566,200	9,233,800.00
259	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Murung Raya 4	47,800,000	45,399,500	2,400,500.00
260	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Tanjung Pagar 3	28,000,000	28,000,000	0.00
261	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Belitung Utara 1	35,600,000	27,560,000	8,040,000.00
262	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Telaga Biru 7	64,200,000	34,205,000	29,995,000.00
263	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kuin Selatan 5	27,000,000	27,000,000	0.00
264	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kuin Selatan 6	20,600,000	20,600,000	0.00
265	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kuin Cerucuk 1	90,200,000	76,430,000	13,770,000.00
266	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Kuin Cerucuk 3	43,400,000	43,313,400	86,600.00
267	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Pemurus Dalam 2	35,200,000	34,875,000	325,000.00
268	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Sungai Andai 3	42,400,000	42,310,000	90,000.00
269	Penyediaan Dana BSM untuk jenjang SD dan SMP	58,000,000	8,775,500	49,224,500.00
270	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	200,000,000	179,406,700	20,593,300.00
271	Kegiatan Operasional Sekolah SD N Sungai Andai 4	25,200,000	25,200,000	0.00
272	Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar	1,770,000,000	1,466,856,000	303,144,000.00
F	Program Pendidikan Menengah			

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN		
		NILAI DPA Rp	REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)
1	2	3	Rp	10
273	Pembangunan Gedung Sekolah	150,000,000	-	150,000,000.00
274	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	838,600,000	820,916,000	17,684,000.00
275	Pengadaan Mebeluer Sekolah	750,000,000	466,217,000	283,783,000.00
276	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	392,735,000	267,050,000	125,685,000.00
277	Peningkatan Pembinaan Kreativitas dan Perpustakaan Kesiswaan	445,900,000	376,840,000	69,060,000.00
278	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMP)	150,000,000	92,161,500	57,838,500.00
279	Penyelenggaraan Ujian Nasional untuk Pendidikan Menengah	153,515,000	77,750,000	75,765,000.00
280	Pembinaan Kelompok Kerja MGMP SMP, SMA dan SMK	198,250,000	144,016,000	54,234,000.00
281	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah/Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (UPA)	140,765,000	84,026,000	56,739,000.00
282	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	584,500,000	563,981,000	20,519,000.00
283	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1,919,961,200	1,677,563,000	242,398,200.00
284	Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Kepala SMA/SMK	96,500,000	52,775,000	43,725,000.00
285	Penyelenggaraan Kelas Khusus Olahraga Untuk Pendidikan Menengah	208,995,000	172,805,000	36,190,000.00
G	Program Pendidikan Non Formal			
285	Pemberdayaan Tenaga Pendidikan Non Formal	261,500,000	208,210,625	53,289,375.00
286	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	80,000,000	62,500,000	17,500,000.00
287	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	312,800,000	240,300,000	72,500,000.00
288	Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup	75,000,000	75,000,000	0.00
289	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	75,000,000	74,400,000	600,000.00
290	Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal	24,600,000	24,600,000	0.00
H	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan			
291	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk memenuhi Standar Kompetensi	720,023,000	678,789,000	41,234,000.00
292	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	520,000,000	478,653,000	41,347,000.00
293	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program DIKLAT Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	189,223,000	92,450,000	96,773,000.00
294	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	624,710,000	467,580,000	157,130,000.00
295	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,617,860,000	1,483,293,000	134,567,000.00
I	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
296	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	380,300,000	17,675,000	362,625,000.00
297	Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	150,000,000	145,192,000	4,808,000.00
298	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	575,175,000	344,895,000	230,280,000.00
299	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	100,000,000	47,979,000	52,021,000.00
Jumlah		66,037,153,050	57,795,164,208	8,241,988,842.00

NO	URAIAN KEGIATAN	NILAI DPA	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,217,073,000	3,757,940,322	89.11
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,774,489,000	1,590,549,100	89.63
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5,413,850	5,413,850	100.00
D	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3,100,000,000	3,013,600,000	97.21
E	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	45,204,265,000	40,190,043,811	88.91
F	Program Pendidikan Menengah	6,029,721,200	4,796,100,500	79.54
G	Program Pendidikan Non Formal	828,900,000	685,010,625	82.64
H	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	3,671,816,000	3,200,765,000	87.17
I	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,205,475,000	555,741,000	46.10
	Jumlah	66,037,153,050	57,795,164,208	87.52

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2015 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2015. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, kewajiban dan rasa tanggungjawab, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) didunia pendidikan. LAKIP Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2015 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari 9 (Sembilan) program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2015 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2015 adalah sebesar 138,74 Dari sebanyak 20 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2015 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Dengan rincian sebanyak 19 Indikator Kinerja (95%) capaian kinerjanya sangat tinggi dan Cuma 1 Indikator Kinerja (5%) capaian kinerjanya sangat rendah.

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja Keuangan Dinas Pendidikan tahun 2015 adalah sebesar 87,52 persen. Dari sebanyak 9 program Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, sebanyak 2 program (22,22%) dengan capaian kinerja keuangannya sangat tinggi, 6 program (66,67%) dengan capaian kinerja keuangannya tinggi dan 1 program (11,11%) dengan capaian kinerja keuangannya sangat rendah.

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian kinerja keuangan pada 9 (Sembilan) program Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin selama tahun 2015 :

Tabel 4.1

NO	URAIAN KEGIATAN	NILAI DPA	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,217,073,000	3,757,940,322	89.11
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,774,489,000	1,590,549,100	89.63
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5,413,850	5,413,850	100.00
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3,100,000,000	3,013,600,000	97.21
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	45,204,265,000	40,190,043,811	88.91
6	Program Pendidikan Menengah	6,029,721,200	4,796,100,500	79.54
7	Program Pendidikan Non Formal	828,900,000	685,010,625	82.64
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	3,671,816,000	3,200,765,000	87.17
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,205,475,000	555,741,000	46.10
Jumlah		66,037,153,050	57,795,164,208	87.52

Keberhasilan yang ada pada tahun terakhir dari pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2011-2015, merupakan finishing point bagi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam merumuskan program – program rencana strategis untuk RENSTRA periode berikutnya.

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan antara lain pengimplementasian kurikulum 2013, peningkatan akses dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan menengah, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan ujian nasional yang lebih berkualitas, penerimaan peserta didik baru, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta penyebaran guru yang belum merata. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin

tercapainya kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan visi Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan untuk Membentuk Insan Cerdas Komprehensif dapat terwujud.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 87,52 persen dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 66,037,153,050,- . Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya aksesibilitas pendidikan di Kota Banjarmasin (97,21%) sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya kualitas pendidikan (82,64%). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2015 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bias dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil dari pada yang ditargetkan dan juga lebih kecil dari pada realisasi capaian kinerjanya. Memang masih terdapat indikator kinerja yang realisasi kinerjanya masih rendah hanya 61,31%, akan tetapi secara keseluruhan capaian kinerja untuk keempat sasaran yang ada sudah sangat tinggi dengan capaian diatas 100% bahkan ada sasaran kinerja yang capaiannya 205,76% hal ini menunjukan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sudah sangat berhasil dan efisien dengan realisasi anggaran sebesar 87,52%.

Pada masa yang akan datang diharapkan perencanaan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan semakin matang dengan segala indicator yang lebih smart, apalagi pada tahun 2016 nanti Kota Banjarmasin dipimpin oleh Kepala Daerah baru hasil dari pilkada terpilih yang akan menetapkan Visi dan Misi yang baru dimana Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin akan merencanakan RPJMD periode 2017-2021 begitu juga Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin juga memulainya dengan RENSTRA baru juga. Dengan kata lain tahun 2016 nanti merupakan tahun transisi dan tahunnya perencanaan untuk Kota Banjarmasin dan seluruh Perangkat Daerah yang ada termasuk Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Dengan adanya RENSTRA yang baru tersebut diharapkan pelayanan terhadap masyarakat untuk urusan wajib pendidikan bisa lebih meningkat lagi dengan penuntasan SPM pendidikan, penuntasan Wajib Belajar 9 tahun serta meningkatnya kualitas pendidikan di Kota Banjarmasin.

**DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARMASIN**